

**PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE
GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2008**



S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

EKA HARDIKASARI

NIM. C2C607053

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Eka Hardikasari

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 607 053

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2008**

Semarang, Maret 2011

Dosen Pembimbing

(Dr. H. Sugeng Pamudji, Msi. Akt)

NIP : 19490124 198001 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Eka Hardikasari

Nomor Induk Mahasiswa : C2C 607 053

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2008**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal : Maret 2011

Tim Penguji

1. Dr. H. Sugeng Pamudji, Msi. Akt ()
2. Totok Dewayanto, SE.,Msi.,Akt ()
3. Dul Muid, SE.,Msi.,Akt ()

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandang di bawah ini saya, Eka Hardikasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan pada Industri Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2006-2008**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan / atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, meniru atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Maret 2011

Yang Membuat Pernyataan

(Eka Hardikasari)

NIM. C2C 607 053

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hidup Ini Adalah Perjuangan dan Saya Akan Berusaha Sebaik Mungkin Untuk
Memperjuangkan Hidup Ini Untuk Menjadikan Masa Depan Yang Baik

Berusahalah Untuk Menjadi Orang Baik, Baik Dimata Teman, Keluarga, dan
Tentunya Allah SWT.

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya tersayang

Keluarga saya tersayang

BIODATA PENULIS

Nama : Eka Hardikasari
NIM : C2C 607 053
Jurusan : Akuntansi (S1)
Tempat/tanggal lahir : Kebumen, 02 Mei 1989
Alamat : Desa Prasutan RT 02 RW 02, Kec. Ambal, Kebumen
No HP : 085640400780

ABSTRAKSI

Corporate Governance (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan. Isu mengenai *Corporate Governance* (CG) mulai menjadi pembahasan yang penting, khususnya di Indonesia, yaitu setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tata kelola perusahaan dan kinerja keuangan dalam sektor perbankan yang nantinya akan menentukan pada tata kelola perusahaan.

Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industri perbankan di Indonesia. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2008. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk menentukan sampel pilihan digunakan metode *purposive sampling*. Dengan menggunakan metode ini maka didapatkan 22 perusahaan perbankan yang akan dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian hipotesis, maka menunjukkan bahwa *corporate governanace* yang dalam penelitian ini terdiri dari indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan, Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan dan hipotesis kedua menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

Kata Kunci : *Corporate Governanace, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan (CFROA)*

ABSTRACT

Corporate Governance (CG) is a corporate governance that explain the relationship between various parties within the company that determines the direction and performance of the company. Issues on Corporate Governance (CG) start to become an important discussion, especially in Indonesia, named after Indonesia experienced a prolonged period of crisis since 1998. The purpose of this study was to measure the corporate governance and financial performance in the banking sector which will determine on corporate governance.

In this study the concept of indicators adopted in corporate governance mechanisms consist of: the size of the board of directors, board size and firm size on earnings management practices by the banking industry in Indonesia. The sample in this study are all banking companies listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2006-2008. The method of analysis used in this study is multiple regression, because in accordance with the purpose of this study was to analyze the influence of independent variables on the dependent variable. To menentuan sample selection used a purposive sampling method. By using this method are obtained 22 companies banking that will serve as samples in this study.

From the results of hypothesis testing, it shows that corporate governanace that in this research consist of indicators of the size of the board of directors, board size and company size. And his results point that the size of the board of directors is not significant negative effect on the financial performance while the size of the board of commissioners and company size is not significant positive effect on financial performance. So it can be concluded that all hypotheses showed no significant impact on financial performance.

Keywords: *Corporate Governanace, Size of the Board of Directors, the size of the Board of Commissioners, Company Size and Financial Performance (CFROA)*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya. Shalawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan seluruh umat islam dalam jalan dan suri tauladan yang baik. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan puji syukur Alhamdulillah untuk semua anugrah yang telah diberikan kepada penulis selama ini sehingga dapat melalui proses studi yang panjang ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2008.”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

3. Bapak Dr. H. Sugeng Pamudji, Msi., Akt., selaku Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktu, perhatian dan segala bimbingan serta arahnya selama penulisan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Sudarno, Msi., Akt., Ph., D., selaku Dosen Wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
5. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro serta staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas ekonomi maupun Magister Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang, terima kasih atas kesabaran dan kemudahan yang telah diberikan.
6. Kedua orang tua saya tersayang (Bapak Surman dan ibu Asliyah) atas segala kasih sayang, doa, semangat, dukungan, bimbingan dan nasihat yang tidak ada henti-hentinya, dan buat keluarga ku tersayang yang senantiasa memberikan dorongan dan inspirasi selama penulis menjalankan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
7. Kekasih saya tercinta (Mas Imam Rojani) yang selalu memberikan kasih sayang, cinta dan perhatian yang tidak ada henti-hentinya. Dan atas segala dorongan dan semangat mulai dari awal hingga akhir studi, dan sampai sekarang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Sahabat-sahabat terbaik, Ratna Ria Hermawaty, Fitri Sayekti, Fitriyani, Atria Maharani dan masih banyak lagi. Terimakasih atas segala bantuan, dukungan, perhatian kalian semua, sampai penulis dapat menyelesaikan studi di FE UNDIP hingga proses penyusunan skripsi sampai selesai.
9. Teman-teman Akuntansi Reguler II Angkatan 2007, Terima kasih untuk semua dukungan dan kepedulian kalian semua.
10. Teman-teman KKN (Tommy, April, Mando, Melta, Isma, Ardi, Tegar, Manuel) Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus yang sudah seperti keluarga, terima kasih atas kerja samanya mulai dari awal hingga akhir KKN.
11. Segala pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik semua pihak yang telah memberikan inspirasi, dukungan, bantuan, pengarahan dan bimbingan kepada penulis. Dan akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, Maret 2011

Penulis

Eka Hardikasari
NIM. C2C 607 05

DAFTAR ISI

Halaman Depan	I
Persetujuan Skripsi	ii
Pengesahan Kelulusan Ujian	iii
Pernyataan Orisinalitas Skripsi	iv
Motto dan Persembahan	v
Abstraksi	vi
<i>Abstract</i>	vii
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiv
Daftar Tabel	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Penelitian	12
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Keagenan	14
2.2 Pengertian dan Konsep Dasar <i>Corporate Governance</i>	16
2.2.1 Pengertian <i>Corporate Governance</i>	16
2.2.2 Prinsip-Prinsip <i>Corporate Governance</i>	19
2.2.3 Manfaat dan Tujuan <i>Corporate Governance</i>	23
2.2.4 Peraturan tentang <i>Corporate Governance</i>	24
2.2.5 Implementasi <i>Corporate Governance</i>	29

2.2.6	Implementasi <i>CG</i> dalam Perbankan	30
2.2.7	Pengaruh <i>CG</i> Terhadap Kinerja Perusahaan	32
2.3	Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja	33
2.3.1	Pengertian Kinerja Perusahaan	33
2.3.2	Kinerja Perbankan	34
2.3.3	Evaluasi Kinerja	35
2.3.4	Tujuan Evaluasi Kinerja	37
2.4	Penelitian Terdahulu	38
2.5	Kerangka Pemikiran	40
2.6	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	41
2.7	Perumusan Hipotesis	47

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sumber Data	48
3.2	Populasi dan Sampel	48
3.3	Metode Pengumpulan Data	50
3.4	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	50
3.5	Metode Analisis	53
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	53
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	54
3.5.3	Analisis Regresi	56
3.5.4	Pengujian Hipotesis	57
3.5.4.1	Uji Regresi Simultan (Uji F)	57
3.5.4.2	Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)	58
3.5.4.3	Koefisiensi Determinan (Uji R^2)	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	60
4.2	Analisis Data	61

4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif	61
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	64
4.2.3	Analisis Regresi Linear Berganda	71
4.2.3.1	Uji Koefisien Determinan (R^2)	72
4.2.3.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)	73
4.2.3.3	Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)	74
4.2.3.4	Pengujian Hipotesis	77
4.3	Pembahasan	78
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan	84
5.2	Keterbatasan Penelitian	86
5.3	Saran	87
DAFTAR PUSTAKA		89
LAMPIRAN		93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Grafik Histogram	65
Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot of Regression Standardized Residual	66
Gambar 4.3 Grafik Scatterplot	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian – Penelitian Terdahulu	41
Tabel 3.1 Tabulasi Sampel Perusahaan	50
Tabel 4.1 Daftar Nama Perusahaan Sampel	61
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.3 Hasil Uji Kolmogorov-Sminov	67
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	68
Tabel 4.5 Hasil Besaran Korelasi Antar Variabel	69
Tabel 4.6 Hasil Uji Durbin Watson	71
Tabel 4.7 Hasil Uji Nilai R dan Koefisien Determinan	72
Tabel 4.8 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F)	74
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Pengujian Parameter Individual	75

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Corporate Governance (CG) merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan yang menentukan antara arah dan kinerja perusahaan (Monks & Minow, 2001). Isu mengenai *Corporate Governance* (CG) mulai menjadi pembahasan yang penting, khususnya di Indonesia, yaitu setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan bahwa lamanya proses perbaikan masalah krisis yang terjadi di Indonesia disebabkan karena sangat lemahnya *Corporate Governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *Corporate Governance*.

Masalah mengenai *Corporate Governance* mulai meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan pada tahun 2001 yang terjadi di perusahaan public yang melibatkan manipulasi laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk (Boediono, 2005). Dengan adanya kasus tersebut, sangat membuktikan bahwa penerapan *Corporate Governance* masih sangat lemah, karena praktik manipulasi laporan keuangan masih tetap dilakukan walaupun sudah menjauhi periode krisis yaitu tahun 1997-1998. Bukti

menunjukkan lemahnya praktik *Corporate Governance* di Indonesia mengarah pada defisiensi dalam pembuatan keputusan dan tindakan perusahaan (Alijoyo *et al.*, 2004).

Penerapan *Corporate Governance* merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia. Peran dan tuntutan para investor dan kreditor asing mengenai penerapan prinsip *Corporate Governance* merupakan salah satu faktor dalam pengambilan keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan. Untuk itu penerapan *Corporate Governance* di Indonesia sangat penting, karena prinsip *Corporate Governance* dapat memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan, sehingga perusahaan di Indonesia tidak tertindas dan dapat bersaing secara global.

Dengan adanya sistem *Corporate Governance* para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh *return* atas investasinya, karena *Corporate Governance* dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor. *Corporate Governance* juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien di sektor korporat. Dalam hal ini *Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan *stakeholder* internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya. (FCGI, 2003).

Dengan melihat keadaan tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan *Corporate Governance*. *Corporate Governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervise atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *Corporate Governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua penggunaan laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan akan terus membaik dan diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat dan akan menguntungkan bagi banyak pihak.

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkat efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate Governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004).

Porter (1991) menyatakan bahwa terdapat alasan mengapa perusahaan sukses atau gagal mungkin hal itu lebih disebabkan karena adanya strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya mencakup strategi penerapan system *Corporate Governance* dalam perusahaan. Struktur dalam *Corporate Governance* bias menjadi tolok ukur dalam menentukan kesuksesan atau kegagalan pada suatu perusahaan.

Maka sulit dipungkiri bahwa selama tahun-tahun terakhir ini, *Corporate governance* sangat populer. Tak hanya populer, tetapi *Corporate Governance* tersebut juga ditempatkan di posisi terhormat. Hal tersebut terwujud dalam dua keyakinan. Pertama, *Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan dalam bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang (Wolfensohn, 1999).

Penelitian mengenai efektivitas *Corporate Governance* telah banyak dilakukan oleh para peneliti, antara lain : Midiastuty dan Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo (2004), Boediono (2005) Veronica dan Utama (2005), Sugiarta (2004). Akan tetapi penelitian yang dilakukan hanya mencakup penelitian pada perusahaan yang telah listing di BEJ. Penelitian ini tidak mencakup perusahaan perbankan. Padahal perusahaan perbankan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan lainnya. Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai efektivitas *Corporate Governance* di industri perbankan tersebut.

Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak). Sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1992, Bank Indonesia sebagai pengawas tunggal perbankan secara konsisten akan terus berupaya agar perkembangan system perbankan di Indonesia menuju ke arah

sistem perbankan yang sehat dan kokoh. Sebagai konsekuensinya, dalam masa transisi bank-bank yang lemah harus mencari sendiri cara penyelesaian yang terbaik untuk memperkuat posisinya berdasarkan situasi dan kompetisi pasar tanpa campur tangan dari Bank Indonesia. Sikap Bank Indonesia dan komitmen untuk mendorong ke arah terciptanya system perbankan yang sehat dan kokoh berdasarkan standar internasional yang akan menjamin adanya pengakuan internasional terhadap perbankan di Indonesia dalam era globalisasi.

Oleh karena itu, banyak manajer kinerja keuangan yang melakukan tindakan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat masuk dalam criteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia (Setiawati dan Na'im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 2006). Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa industry perbankan di Indonesia melakukan tindakan manajemen laba untuk memenuhi criteria dari Bank Indonesia tersebut. Setiawati dan Na'im (2001) berargumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajem dapat menyebabkan adanya distorsi dalam alokasi dana.

Padahal industri perbankan merupakan industri “kepercayaan” bagi para inverteor. Jika para investor berkurang kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias yang disebabkan karena adanya tindakan manajemen laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang dapat mengakibatkan *rush*. Oleh karena itu, perlu adanya suatu mekanisme untuk meminimalkan bahkan menghilangkan tindakan manajemen laba yang dilakukan

oleh perusahaan perbankan. Salah mekanisme tersebut adalah dengan menerapkan praktik *Corporate Governance*.

Menurut pendapat Caprio dan Levine (2002), sebagaimana telah dikutip oleh Sam'ani (2008), terdapat dua hal yang saling terkait menyangkut lembaga intermediasi keuangan perbankan yang berpengaruh terhadap *Corporate Governance*. Pertama, bank merupakan sektor usaha yang tidak transparan, sehingga memungkinkan terjadinya masalah keagenan. Kedua, bank merupakan sektor usaha yang memiliki tingkat regulasi tinggi yang dalam hal tertentu justru akan menghambat mekanisme *Corporate Governance*. Masalah keagenan dalam sektor keuangan perbankan pada hakekatnya dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama masalah keagenan akibat utang (*debt agency problem*) dan kedua masalah keagenan akibat kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*).

Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh James D. Wolfensohn, Presiden of the World Bank, c. (1999), terdapat dua teori utama yang terkait dengan *Corporate Governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory*. *Stewardship theory* dibangun diatas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab memiliki, integrasi, dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Sedangkan, *agency theory* yang dikembangkan oleh Michael John, seorang professor dari Harvard, memandang

bahwa manajemen sebagai ‘*agents*’ bagi para pemegang saham , akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham sebagaimana diasumsikan dalam *stewardship model*. Bertentangan dengan *stewardship theory*, *agency theory* memandang bahwa manajemen tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik pada umumnya maupun *shareholders* pada khususnya. Dengan demikian “manajer could not be trusted to do their job-which of course is to maximize shareholder value” .

Dalam *agency theory*, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain atau karyawan (*agent*) untuk dapat memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan wewenangnya terhadap agent tersebut (Jensen dan Mecking, 1976). Seorang manajer sebagai pengelola perusahaan akan lebih banyak mengetahui tentang keadaan perusahaan tersebut dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, seorang manajer berkewajiban untuk memberikan informasi perusahaan terhadap pemilik perusahaan. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ada pada perusahaan. Kondisi ini yang disebut dengan informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (Haris, 2004). Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja keuangan pada perusahaan (Richardson, 1998).

Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak terlepas dari proses penyusunan. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Menurut Theresia (2005) manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang dilaporkan oleh perusahaan (Gideon, 2005).

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serata dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004).

Cash Flow Return On Aset (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran

kinerja perusahaan saat ini dan CFROA tidak terkait dengan harga saham (Cornett *et al.*, 2006).

Dalam penelitian ini konsep indikator yang dipakai dalam mekanisme *Corporate Governance* terdiri dari: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh industry perbankan di Indonesia. Dalam mendeteksi manajemen laba digunakan model yaitu penyisihan kerugian piutang (*allowances for loan losses*) dan provisi kerugian pinjaman sebagai komponen pembentukan total akrual dalam perusahaan perbankan (Beaver dan engel, 1996). Dalam hal ini komponen total akrual ditunjukkan oleh cadangan kerugian piutang yang dalam operasi perusahaan perbankan ditunjukkan oleh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 31/148/KEP/DIR tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yang dimaksud dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil sampel dari populasi pada laporan keuangan perusahaan perbankan yang telah go public dari tahun 2006-2008. Pemilihan data tahun 2006-2008 dimaksudkan karena adanya atau telah dikeluarkannya peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang penerapan *corporate governanace* mulai tahun 2006 yaitu peraturan bagi bank umum mengenai Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 yaitu tentang

penerapan *corporate governance* bagi bank umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Penelitian tentang *corporate governance* memang telah banyak dilakukan, tetapi penelitian tersebut hanya mencakup perusahaan yang telah listing di BEJ, tidak termasuk dalam perusahaan perbankan. Maka penulis dalam hal ini bermaksud akan menyusun penelitian yang lebih difokuskan pada perusahaan perbankan dengan mengambil judul

“ PENGARUH PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2006-2008 ”

1.2 Rumusan Masalah

Perusahaan perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan perusahaan lainnya, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum. Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak). Untuk itu banyak dari manajer yang melakukan manajemen laba, supaya perusahaannya masuk dalam kriteria yang disyaratkan oleh Bank Indonesia. Padahal tindakan tersebut sangat tidak diperbolehkan, karena tindakan tersebut termasuk dalam tindakan manipulasi. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme untuk meminimalkan bahkan menghilangkan tindakan

manajemen laba tersebut di perusahaan perbankan Indonesia. Salah satu system yang dapat digunakan adalah adanya penerapan *Corporate Governance*.

Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis dan kualitas kinerja, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan para *stakeholders* lainnya agar perusahaan perbankan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan efisiensi. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah “apakah penerapan *Corporate Governance*, yang dalam penelitian ini mencakup indikator ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *Corporate Governance* yang terdiri dari indikator: ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja keuangan perusahaan, khususnya bagi industri perbankan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada industry perbankan.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pengaruh pelaksanaan *Corporate Governance* di Indonesia, khususnya pengaruh terhadap kinerja keuangan pada industri perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

2. BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian dari landasan teori yang mendasari Corporate Governance dan pengaruhnya terhadap kinerja perusahaan, kajian penelitian-penelitian sebelumnya dan pengembangan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variable penelitian dan definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisisnya.

4. BAB VI HASIL DAN ANALISIS

Bab ini menjelaskan mengenai deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang dilakukan, sesuai dengan alat analisis yang digunakan.

5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Teory)

Teori keagenan merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami konsep *Corporate Governance*. Teori agen ini dikembangkan oleh Michael Johnson, yang memandang bahwa manajemen perusahaan (*agents*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Teori agen dipandang lebih luas karena teori ini dianggap lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *Corporate Governance* berkembang dengan bertumpu pada teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku (Wolfensohn, 1999).

Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Seorang manajer (*agent*) akan lebih mengetahui mengenai keadaan perusahaannya dibandingkan dengan pemilik (*principal*). Manajer (*agent*) berkewajiban untuk memberikan informasi kepada pemilik (*principal*). Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di perusahaan. Konflik kepentingan

antar manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) akan menimbulkan adanya biaya keagenan (*agency cost*).

Agency cost ini mencakup biaya untuk pengawasan oleh pemegang saham, biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan laporan yang transparan, termasuk biaya audit yang independen dan pengendalian internal, serta biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan pemegang saham sebagai bentuk '*bonding expenditures*' yang diberikan kepada manajemen dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk tujuan menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham. Selain *agency cost*, konflik yang terjadi antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*) juga dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan tindakan manajemen laba.

Dan teori agensi juga menjelaskan tentang timbulnya manajemen laba yang terjadi dalam suatu perusahaan. Dalam suatu perusahaan pasti terdapat seorang manajer dan seorang pemilik. Dan dalam hal ini, seorang manajer mempunyai tanggung jawab lebih banyak terhadap perusahaan tersebut. Manajer harus dapat mengoptimalkan keuntungan perusahaan, yang nantinya akan dilaporkan kepada pemilik. Dengan adanya tanggung jawab yang besar tersebut, manajer pasti akan menginginkan adanya imbalan yang besar. Dengan demikian dalam perusahaan terdapat dua kepentingan yang berbeda. Yaitu kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan kepentingan bagaimana dengan memegang tanggung jawab yang besar, maka akan mendapatkan imbalan yang besar juga, yaitu kepentingan untuk pribadinya sendiri.

Menurut Eisenhardt (1989) bahwa teori agency menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). Yaitu kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil yang telah dicapai dalam mengelola tanggung jawab dari sebuah perusahaan.

Tujuan utama dengan adanya teori agency tersebut adalah untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat mendesain kontrak yang tujuannya untuk meminimalisir *cost* sebagai dampak adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi yang mengalami ketidakpastian. Teori agen juga berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan.

2.2 Pengertian dan Konsep Dasar *Corporate Governance*

2.2.1 Pengertian *Corporate Governance*

Corporate Governance menurut Komite Cadbury adalah system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai

keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya. *Cadbury Commite* adalah seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentinagn lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, h.24).

OECD mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antar pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepeintinagan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, h.25).

Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002, *Corporate Governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Adapun tujuan akhir

dari penerapan system ini adalah untuk menaikkan nilai saham dalam jangka panjang tetapi tetap memperhatikan berbagai kepentingan para *stakeholder* lainnya (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, h.25).

Menurut Price Waterhouse Coopers, *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, system, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders* (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, h.26).

Selain empat definisi diatas, terdapat definisi-definisi lain. Stijn Claessens menyatakan bahwa, pengertian tentang Corporate Governance dapat diasumsikan dalam dua kategori. *Kategori pertama*, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. *Kategori kedua*, lebih melihat pada kerangka secara normative, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari system hukum, system peradilan, pasar uang, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Corporate Governance* merupakan:

1. Suatu struktur yang mengatur pola hubungan harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan para *stakeholder* lainnya.

2. Suatu system pengecekan dan perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang: pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan.
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, dan juga pengukuran kinerjanya.

Dari definisi tentang *Corporate Governance* diatas, maka dapat diketahui adanya aspek-aspek penting dari *Corporate Governance* yang perlu dipahami oleh perusahaan agar dapat bersaing dalam dunia bisnis adalah:

1. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan diantaranya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.
2. Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*.
3. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan.
4. Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang materil dan relevan.

2.2.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing.
2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah.
3. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh *stakeholder* secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan, merupakan tujuan utama yang hendak dicapai. Prinsip-prinsip dari *Corporate Governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), adalah:

1. Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham

minoritas dan pemegang saham asing dari kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2. Transparency (Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

3. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan system pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban

kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

5. Independensi (independen)

Untuk melancarkan asas *Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

Prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas, responsibilitas dan independen *Corporate Governance* dalam mengurus perusahaan, sebaiknya diimbangi dengan *Good Faith* (bertindak atas iktikad baik) dan kode etik perusahaan serta pedoman *Corporate Governance*, agar visi dan misi perusahaan dapat terwujud. Pedoman *Corporate Governance* yang telah dibuat oleh komite nasional *Corporate Governance* hendaknya dijadikan kode etik perusahaan yang dapat memberikan acuan pada pelaku usaha untuk melaksanakan *Corporate*

Governance secara konsisten dan konsekuen. Hal ini penting karena mengingat kecenderungan aktifitas usaha yang semakin mengglobal dan dapat dijadikan sebagai ukuran perusahaan untuk menghasilkan suatu kinerja perusahaan yang lebih baik.

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditor, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

2.2.3 Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance*

Esensi *Corporate Governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholder* dan pemakai kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003). Disamping hal tersebut *Corporate Governance* juga mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan *Corporate Value*.
3. Mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
4. Meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada public lebih luas dalam jangka panjang.
5. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan tujuan *Corporate Governance* adalah sebagai berikut :

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham.
2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *stakeholder* non pemegang saham.
3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan.
5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan.

2.2.4 Peraturan tentang *Good Corporate Governanace* :

1. Peraturan dari Keputusan Menteri BUMN

- Kep-103/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2000

Peraturan tentang pembentukan komite audit bagi Badan Usaha Milik Negara.

Yaitu bahwa komite audit bertugas untuk membantu dan bertanggung jawab langsung kepada komisaris atau dewan pengawas.

- Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002

Peraturan tentang penerapan *Good Corporate Governanace* pada BUMN yang mencabut Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN No : Kep-23/M-PM.

- PBUMN/2000 tanggal 31 Mei 2000

Yang mewajibkan BUMN untuk menerapkan *good corporate governanace* secara konsisten dan/ atau menjadikan prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya.

2. Peraturan dari Bank Indonesia :

- Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000

Yaitu tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.

- Peraturan Bank Indonesia No. 5/25/PBI/2003

Yaitu tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*fit and Proper Test*), dimana calon direksi dan komisaris bank harus memenuhi kompetensi tertentu untuk menjadi pengurus bank.

- Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003

Tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkannya SE No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003.

3. Peraturan dari Bapepam :

- Peraturan Bapepam Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Peraturan ini berkaitan dengan prinsip fairness dalam GCG yang mengisyaratkan adanya kewajaran dan keseimbangan yang harus diterapkan pada semua pemegang saham.

- Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan Tahunan

Peraturan ini berkaitan dengan prinsip transparansi dari GCG, yang mewajibkan penyampaian laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala.

- Peraturan Bapepam No.IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Peraturan ini merupakan salah satu Peraturan Bapepem yang sangat mencerminkan pentingnya diterapkan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perusahaan.

- Peraturan Bapepam No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang Dilakukan Perusahaan Terbuka

Peraturan ini menunjukkan bagaimana prinsip kewajaran, transparansi dan akuntabilitas diterapkan.

- Peraturan Bapepam No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha dan Peleburan Perusahaan Publik dan Emiten

Peraturan ini berkaitan dengan pelaksanaan prinsip tanggung jawab yang menyangkut tanggung jawab suatu perusahaan untuk taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Peraturan Bapepam No.IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS

Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS.

- Peraturan Bapepam No.IX.J.1 tentang Pengaturan tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik

Menurut ketentuan ini pemegang saham berhak memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dan menggunakan hak suara dalam RUPS serta mendapatkan informasi tentang tata cara RUP, termasuk penggunaan hak suara.

- Peraturan Bapepam No.X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik

Peraturan ini dengan tegas mewajibkan emiten untuk menyampaikan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat hari kerja kedua setelah keputusan atau terjadinya peristiwa atau fakta material yang mungkin dapat mempengaruhi nilai efek, perusahaan, dan keputusan investor.

- Peraturan Bapepam No.X.K.4 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan penggunaan dana yang diperoleh dari penawaran umum kepada public.

- Peraturan Bapepam No.IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka

Peraturan ini memuat kewajiban untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan proses pengambilalihan oleh pihak pengambil alih kepada otoritas pasar modal, bursa, dan public, serta memuat kewajiban untuk melakukan tender offer.

- Peraturan Bapepam No.IX.F.1 tentang Penawaran Tender

Dalam hal terjadinya pembelian perusahaan terbuka, diwajibkan untuk melakukan tender offer, dimana peraturan ini memberikan bentuk yang lebih jelas berkaitan dengan pengambilalihan perusahaan terbuka.

- Peraturan Bapepam No.VIII.G.11 tentang Tanggung Jawab Direksi atas Laporan Keuangan

Peraturan ini merupakan peraturan yang mengimplementasikan secara konkret prinsip akuntabilitas dan prinsip tanggung jawab, karena memberikan gambaran yang jelas bagaimana tanggung jawab para direksi atas laporan keuangan perusahaan yang dilaporkan secara berkala kepada Bapepam.

- Peraturan Bapepam No.X.K.5 tentang Keterbukaan Informasi bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Dimohonkan Pernyataan Pailit

Ketentuan ini mengatur penerapan prinsip keterbukaan, terutama apabila terhadap suatu perusahaan public dimohonkan pernyataan pailit.

- Peraturan Bapepam No.IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan

Peraturan yang mewajibkan emiten untuk membentuk fungsi sekretaris perusahaan ini adalah juga merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan adalah untuk menghubungkan antara perusahaan public atau emiten dengan para pemodal melalui pemberian informasi-informasi penting yang dibutuhkan sebelum menanam modal.

- Peraturan Bapepam No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan

Peraturan ini diterbitkan dengan maksud untuk meningkatkan penerapan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) bagi emiten dan perusahaan public terutama yang berkaitan dengan persyaratan dan pertanggungjawaban anggota direksi dan komisaris.

2.2.5 Implementasi *Corporate Governance*

Implementasi prinsip-prinsip *Corporate Governance* dalam lingkup pasar modal di Indonesia dapat dijabarkan melalui upaya-upaya Bapepam untuk mendorong perusahaan public agar memperhatikan dan melaksanakan prinsip-

prinsip : *transparansy*, dengan meningkatkan kualitas keterbukaan informasi tentang “*performance*” perusahaan secara tepat waktu, baik yang berupa informasi financial maupun non financial. *Fairness*, dengan memaksimalkan perlindungan hak dan perlakuan adil kepada seluruh *shareholders* tanpa kecuali. *Responsibility*, dengan mendorong optimalisasi peran *stakeholders* dalam rangka mendukung program-program perusahaan. *Accountability*, dengan mendorong optimalisasi peran dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara operasional (Baridwan, 2003). Wulandari (2005) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa indikator mekanisme *Corporate Governance* dapat meningkatkan kinerja perusahaan publik di Indonesia, baik indikator mekanisme *Corporate Governance* internal (jumlah dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan *dept to equity*) maupun indikator mekanisme eksternal (Sam’ain, 2008).

Penerapan prinsip *Corporate Governance* ini adalah untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.

2.2.6 Implementasi Prinsip-Prinsip *Corporate Governance* Dalam Industri Perbankan

Industri perbankan merupakan suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan mempunyai regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lainnya. Oleh karena itu industri perbankan ini membutuhkan adanya prinsip-prinsip dalam menjalankan kegiatan operasinya, khususnya pada kinerja keuangannya, agar kegiatannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan industri perbankan tersebut. Dan prinsip yang paling cocok diterapkan dalam pencapaian tujuan kinerja keuangan tersebut adalah prinsip *Corporate Governance* (Surya dan Ivan Yustiavandana 2006, h.116).

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Corporate Governance* juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan sangat beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan kebutuhan adanya penerapan *Corporate Governance* dalam industri perbankan. Penerapan *Corporate Governance* selain untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan *Corporate Governance* menjadi suatu kepercayaan mengingat industri perbankan mengelola dana public (nasabah).

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip *Corporate Governance* antara lain Peraturan Bank Indonesia No 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, yang didalamnya diatur kriteria yang wajib dipenuhi calon anggota Direksi dan Komisaris Bank Umum, serta batasan transaksi yang diperoleh atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank. Tujuan utama dari peraturan ini adalah berbagai upaya perwujudan *Corporate Governance* dengan mengeliminasi kemungkinan penyimpangan operasional bank yang dilakukan oleh Direksi dan/ Komisaris, maupun pemegang saham.

Peraturan lainnya yang dikeluarkan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan *Corporate Governance* adalah Peraturan Bank Indonesia No 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003. PBI tersebut mewajibkan bank untuk menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko. Selain itu diatur juga mengenai kewenangan dan tanggung jawab direksi dan komisaris yang harus dilakukan terkait penerapan manajemen risiko tersebut.

2.2.7 Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan

Hubungan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan bukan sesuatu yang secara universal dapat diterima, walaupun saat ini ada banyak pengakuan yang luas bahwa pembentukan *corporate governance* secara

substansial dapat mempengaruhi pemegang saham. McKinsey dan Co (2002) melakukan survey yang hasilnya menunjukkan bahwa para investor cenderung menghindari perusahaan-perusahaan dengan predikat buruk dalam *corporate governance*. Perhatian yang diberikan investor terhadap *corporate governance* sama besarnya dengan perhatian terhadap kinerja keuangan perusahaan. Para investor yakin bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* telah berupaya untuk meminimalkan risiko keputusan yang salah akan menguntungkan bagi diri sendiri, sehingga meningkatkan kinerja perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan.

Kinerja perusahaan dapat ditentukan dari sejauh mana keseriusannya dalam menerapkan *corporate governance*. Perusahaan yang terdaftar dalam skor pemeringkatan *corporate governance* yang dilakukan oleh IICG terbukti telah menerapkan *corporate governance* dengan baik dan secara langsung menaikkan nilai sahamnya, semakin tinggi penerapan *corporate governance* yang diukur oleh *Corporate Governance Perception Indeks (CGPI)* maka semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik (Wardani, 2008).

2.3 Pengertian dan Konsep Dasar Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja Perusahaan

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Untuk menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan sudah dicapai, tidaklah mudah

dilakukan karena menyangkut aspek-aspek manajemen yang harus dipertimbangkan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan opsinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui dari kinerja perusahaan tersebut. Apakah kinerjanya sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perusahaan atau belum (Perwirasari, 2009).

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan sering dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi (Simanjuntak 2005, h.1).

Kinerja perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variable untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut bermanfaat untuk membantu investor, kreditor, calon investor dan para pengguna lainnya dalam rangka membuat keputusan investasi, keputusan kredit, analisis saham serta menentukan prospek suatu perusahaan dimasa yang akan datang. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar

perilaku yang ditetapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. Melalui penilaian kinerja, maka perusahaan dapat memilih strategi dan struktur keuangannya.

2.3.2 Kinerja Perbankan

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholders bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan prudential banking regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No 7 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

2.3.3 Evaluasi Kinerja

Dalam pelaksanaan kinerja perusahaan, pasti terdapat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja disini adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dulu.

Evaluasi kinerja berarti memberi nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk itu diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada para pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai oleh orang lain.

Dengan seperti orang tersebut akan berusaha untuk mempertahankan prestasinya, karena orang tersebut merasa bahwa prestasinya diterima dan dihargai oleh orang lain atau dalam suatu perusahaan, prestasi pekerja atau karyawan dapat diterima dan dihargai oleh atasannya.

Evaluasi kinerja juga dapat disebut sebagai penilaian prestasi kerja yang dalam hal ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan. Evaluasi kinerja sekarang ini merupakan keharusan, dan sudah terus menerus dilakukan, terutama dengan melibatkan para pelanggan. Para pelanggan sering meminta memberikan evaluasi misalnya terhadap kualitas barang yang dijual dan kualitas dari sikap karyawan dalam memberikan pelayanan. Sebagai bagian dari fungsi manajemen, proses evaluasi kinerja mengikuti tahapan perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi (Simanjuntak 2005, h.104).

2.3.4 Tujuan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja atau yang disebut juga sebagai penilaian kinerja yang dilakukan dalam suatu perusahaan, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh pendapatan wajar atas penyertaan dalam suatu perusahaan atau mewujudkan bahwa perusahaan bernilai lebih dari apa yang ada didalam neraca.

2. Untuk keperluan merger dan akuisisi yaitu untuk mengetahui berapa nilai perusahaan dan nilai ekuitas dari masing-masing perusahaan.
3. Untuk kepentingan usaha, yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai usaha lebih besar dari pada nilai likuiditasnya.
4. Memperoleh pembelanjaan penetapan besarnya pinjaman atau tambahan modal.

Selain tujuan diatas evaluasi kinerja juga mempunyai tujuan untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan. Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan untuk mengetahui posisi perusahaan, terutama bila terjadi kelambatan atau penyimpangan. Dan evaluasi kinerja juga dimaksudkan untuk mengetahui posisi dan tingkat pencapaian sasaran perusahaan, terutama untuk mengetahui bila terjadi kelambatan atau penyimpangan harus segera diperbaiki, sehingga sasaran atau tujuan dapat tercapai. Hasil evaluasi kinerja atau penilaian kinerja juga dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja perusahaan selanjutnya.

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang penerapan *Corporate Governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Yudha Pranata dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2007, yang berjudul Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* terhadap

Kinerja Keuangan Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Corporate Governance* terhadap ROE, NPM, dan Tobin's Q. Sampel yang digunakan sebanyak 35 perusahaan yang diambil secara *purpose sampling* yaitu perusahaan yang telah go public yang terdaftar di BEJ selama tahun 2001-2005 dan masuk dalam kelompok 10 besar berdasarkan skor pemeringkatan *Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Corporate Governance* berpengaruh terhadap ROE, NPM, dan Tobin's Q dan perubahan yang terjadi pada skor penerapan *Corporate Governance* disebabkan oleh faktor lain yang tidak ditetapkan dalam model regresi.

2. Penelitian oleh Drobetz (2003) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal Jerman, yang melaksanakan *Corporate Governance*. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja saham yang diukur dengan menggunakan *expected stock return*. Perusahaan sampel yang dilibatkan dalam penelitian tersebut sebanyak 91 perusahaan, dengan periode pengamatan selama 50 bulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *expected return*. Selain itu, dalam penelitian ini juga diketahui bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *firm value*, *sales growth* dan PE ratio.
3. Penelitian oleh Erni Hidayah tahun 2007 dengan judul Penerapan *Corporate Governance*, Pengungkapan Informasi, dan Kinerja Perusahaan di Perusahaan

Publik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan *Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui adanya pengungkapan informasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 perusahaan dengan populasi semua perusahaan yang listing di BEJ pada tahun 200-2005. Variable dependen yang dipakai dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan yang diukur dengan ROE dan Tobin's Q sedangkan variable independen adalah *Corporate Governance* yang diukur menggunakan CGPI.

4. Penelitian oleh Bauer (2003) melakukan penelitian terhadap penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap *firm valuation* yang diproxy dengan Tobin's Q dan kinerja perusahaan yang diproxy dengan ROE dan NPM. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam FTSE Eurotop 300 selama periode 2000-2001. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG berpengaruh signifikan terhadap Tobin's Q, ROE dan NPM.
5. Jandik dan Rennie (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang go publik di pasar modal yang sedang berkembang (*emerging market*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja perusahaan yang diproxy dengan rasio profitabilitas, aktivitas, likuiditas dan leverage.

6. Putri (2006) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* dan jumlah komisaris terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ periode 2004-2005. Hasil analisis model regresi dengan Tobin's Q sebagai variable dependennya menunjukkan bahwa baik variable *corporate governance* maupun variabel control mempengaruhi kinerja perusahaan.

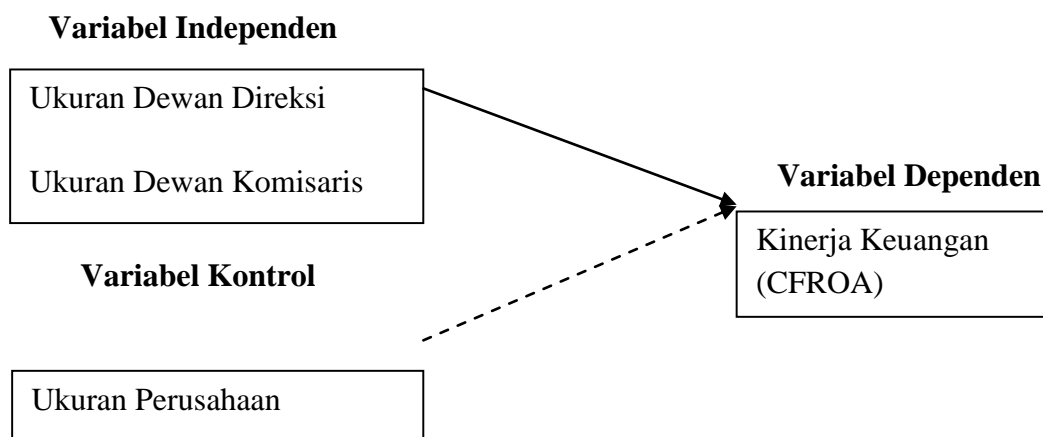
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Tahun	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yudha Pranata	2007	<i>Corporate Governance</i> , ROE, NPM dan <i>Tobin's Q</i>	Penerapan <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap ROE, NPM dan <i>Tobin's Q</i> .
2.	Drobetz	2003	<i>Corporate Governance</i> dan <i>Expected Return</i>	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>expected return</i>
3.	Erni Hidayah	2007	<i>Corporate Governance</i> , ROE, dan <i>Tobin's Q</i>	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
4.	Bauer	2003	<i>Corporate Governance</i> , <i>Tobin's Q</i> , ROE, dan NPM	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>Tobin's Q</i> , ROE dan NPM
5.	Jandik dan Rennie	2005	<i>Corporate Governanace</i> dan kinerja perusahaan	<i>Corporate Governanace</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan
6.	Putri	2006	<i>Corporate Governanace</i> , dewan komisaris, dan <i>Tobin's Q</i>	<i>Corporate Governanace</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan perbankan yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau

tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan perbankan. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu CFROA. CFROA ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan pada gambar berikut :



2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

2.6.1 Ukuran Dewan Direksi

Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang saham sebagai principal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal bagaimana mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976 ; Shleifer & Vishny, 1997). Selain itu Mizruchi (1983) dalam Midiastuti dan Mackfudz (2003) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan,

dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang (Louden, 1982 dalam Midiastuti dan Mackfudz 2003).

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan baru, berapa banyak dewan yang dibutuhkan perusahaan ? apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimalisasi agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependen* (Alexander, Fernell, Halporn, 1993 ; Doodstein, Gautarn, Boeker, 1994 ; Mintzberg, 1983). Maksud dari pandangan *resources dependen* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Pfeffer & Salancik (1978) dalam Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa dengan semakin besar kebutuhan akan menghubungkan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sedangkan kerugian dari jumlah dewan yang besar berkaitan dengan dua hal yaitu : meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dan semakin meningkatnya jumlah dewan dan turunnya kemampuan dewan untuk mengendalikan manajemen, sehingga menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan control (Jensen, 1993 ; Yermack, 1996).

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil sehingga nilai perusahaan yang memiliki dewan direksi lebih sedikit (Jensen, 1993 ; Lipton dan Lorsch, 1992 ; Yermack, 1996). Dalton et al (1999) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg et al (1998) menyatakan bahwa ada hubungan yang negative antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan, dengan menggunakan sampel perusahaan di Finlandia. Jadi, dewan merupakan salah satu mekanisme yang sangat penting dalam *corporate governance* , dimana keberadaannya menentukan kinerja perusahaan.

Bukti yang menyatakan efektifitas ukuran dewan masih berbaur. Dari hasil yang masih belum konklusif tersebut dapat dikatakan bahwa pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan.

Mengingat fungsi yang berbeda antara dewan direksi dengan dewan komisaris, maka penelitian ini membagi ukuran dewan ini menjadi ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris. Kebutuhan akan jumlah dewan direksi dengan dewan komisaris dalam perusahaan yang sedang mengalami tekanan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan akan sangat berbeda.

2.6.2 Pengertian Dewan Direksi

Dewan Direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang [profesional](#) yang ditunjuk oleh [pemilik usaha](#) untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Penyebutan direksi dapat bermacam-macam, yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif.

Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Pada umumnya dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer)
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan

2.6.3 Ukuran Dewan Komisaris

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa makin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan (Yermack 1996, Sundgren, dan Wells 1998, dan Jensen 1993). Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan adanya *agency problem* (masalah keagenan), yaitu dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan

perannya, diantaranya kesulitan dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan (Yermack 1996, Jensen 1993).

Terkait dengan manajemen laba, ukuran dewan komisaris dapat memberikan efek yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Hal ini bisa diketahui dengan pernyataan dari Scott (2002) bahwa melakukan manajemen laba dapat dilaksanakan dengan berbagai cara salah satunya dengan menurunkan laba. Untuk itu hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba positif, makin banyak anggota dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang terjadi. Tetapi ada beberapa peneliti yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris dan manajemen laba berpengaruh negatife.

Peneliti tersebut diantara adalah Yu (2006) dan Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001), yang menyakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negative secara signifikan terhadap manajemen laba, yaitu bahwa menandakan makin sedikit dewan komisaris maka tindakan manajemen laba makin banyak, karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Tetapi penelitian tersebut hanya terjadi pada kasus manajemen laba dengan menggunakan penurunan laba. Dan kasus ini ternyata kurang signifikan dalam beberapa kasus.

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa

ukuran dewan komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate governance. Hal ini diperkuat oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme corporate governance yang penting. Mereka juga menyarankan bahwa dewan komisaris yang berukuran besar akan kurang efektif daripada dewan yang ukurannya kecil.

Penelitian yang dilakukan oleh Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen (1993) juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan.

2.6.4 Pengertian Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Di [Indonesia](#) Dewan Komisaris ditunjuk oleh [RUPS](#) dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Pada umumnya dewan komisaris memiliki tugas dan wewenang antara lain:

1. Melakukan pengawasan atas jalannya usaha PT dan memberikan nasihat kepada direktur

2. Dalam melakukan tugas, dewan direksi berdasarkan kepada kepentingan PT dan sesuai dengan maksud dan tujuan PT.
3. Kewenangan khusus dewan komisaris, bahwa dewan komisaris dapat diamanatkan dalam anggaran dasar untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu direktur, apabila direktur berhalangan atau dalam keadaan tertentu

2.6.5 Ukuran Perusahaan

Selain variabel diatas, maka perlu juga melakukan pengujian terhadap ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan dicerminkan dengan total asset yang menggambarkan seberapa besar dana yang dikelola dan kompleksitasnya. Total asset juga menggambarkan hak & kewajiban serta permodalan bank. Dengan demikian total asset digunakan sebagai variabel control. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangannya, sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat.

Peasnell, Pope dan Young (1998) menunjukkan adanya hubungan negative antara ukuran perusahaan dan manajemen laba di Inggris. Dengan ini disimpulkan bahwa manajer yang memimpin perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil. Penelitian Chtourou, Bedard dan Couteau (2001) menemukan bahwa ukuran perusahaan di Amerika Serikat berpengaruh

negative terhadap manajemen laba pada semua kelompok pengujian. Perusahaan yang lebih besar berkesempatan lebih kecil dalam melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Dari pengujian Veronica dan Utama (2005) dilaporkan bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil tindak manajemen labanya. Rahmawati dan Varidwan (2006) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba perusahaan. Ini menunjukkan bahwa manajer perusahaan besar mendapat insentif yang lebih ketika dia melakukan manajemen laba demi mengurangi kos politisnya (Rahmawati dan Baridwan, 2006).

2.7 Perumusan Hipotesis

Dari telaah pustaka yang telah dijelaskan pada bagian atas, maka penelitian ini akan mengambil simpulan sebagai hipotesis sebagai arah penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

H₁ : Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

H₂ : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data historis. Dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga melalui media perantara dari berbagai sumber yang tersedia. Data tersebut diperoleh dari buku referensi, literatur dan data yang diambil dari Bursa Efek Jakarta.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang telah listed di BEI pada periode 2006-2008. Dengan menggunakan data penelitian yang mencakup data periode tahun 2006-2008 itu sudah dipandang cukup untuk mewakili kondisi perbankan di Indonesia saat ini.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut Mustofa (2000, h.1) adalah keseluruhan elemen atau unsur yang akan diteliti. Maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdapat di dalam Bursa Efek Jakarta. Sedangkan

Sampel adalah sebagian dari populasi, dimana sampel yang baik adalah sampel yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik dari seluruh populasi.

Dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2006-2008. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* atau dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Dan jumlah bank yang akan dijadikan sampel dari tahun 2006-2008 sebanyak 66 yang berasal dari 22 nama perusahaan perbankan, yang sudah sesuai dengan kriteria. Adapun kriteria yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan perbankan yang sudah *go public* terdaftar di BEJ dan mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2006-2008.
2. Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 2006-2008), baik data mengenai *corporate governance* perusahaan maupun data yang diperlukan untuk mendeteksi kinerja keuangan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari laporan keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode tahun 2006-2008 yang bisa dilihat dalam Laporan Publikasi Bank Indonesia dari Direktorat Perbankan Indonesia dari tahun 2006-2008, serta dari situs masing-masing perusahaan sampel.

Tabel 3.1

Tabulasi Sampel Perusahaan

Keterangan	Jumlah
Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEJ Tahun 2006-2008	31
Perusahaan yang Tidak Masuk Sebagai Sampel :	
1. Tidak mempublikasikan dan / atau di delisting periode 2006	6
2. Tidak mempublikasikan dan / atau di delisting periode 2007	1
3. Tidak mempublikasikan dan / atau di delisting periode 2008	2
Total Sampel Penelitian	22

Sumber : Bursa Efek Indonesia (BEI)

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa laporan keuangan perbankan yang sudah *go publik* dan dipublikasikan. Dan perusahaan perbankan tersebut juga harus mempunyai data mengenai jumlah anggota dewan direksi, anggota dewan komisaris dan data tentang laporan konsolidasi perusahaan secara lengkap. Pengambilan data dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) periode dimaksud untuk melakukan uji stabilitas antara regresi tahun 2006-2008.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Variabel Independen atau Variabel Bebas

Adalah itu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dan pada penelitian ini variabel independennya adalah *corporate governanace*, yang terdiri dari indikator :

1. Ukuran Dewan Direksi

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegal dalam mengelola perusahaan. Jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan secara efektif, tetap dan cepat serta bertindak independen. Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan paling kurang 3 orang.

2. Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris adalah jumlah total anggota dewan komisaris, baik yang berasal internal perusahaan maupun dari eksternal perusahaan sampel. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan pengarahan kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris tersebut (KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris

diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 jumlah anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan paling kurang 3 orang. Dan paling banyak sama dengan jumlah anggota dewan direksi.

B. Variabel Kontrol

adalah variabel yang dapat dikendalikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, terdapat variabel control, yaitu berupa ukuran bank yang diukur dengan menggunakan total asset dari perusahaan tersebut

1. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan, yang dalam hal ini adalah ukuran bank adalah seberapa ukuran dari perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan yang dimaksud disini adalah seberapa besar asset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena ukuran perusahaan juga dianggap penting dalam proses pelaporan keuangan, dan yang nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Maka dalam penelitian ini ukuran perusahaan diambil sebagai variabel kontrol, yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ukuran perusahaan disini diukur dengan menggunakan jumlah total asset dalam perusahaan sampel tersebut.

C. Variabel Dependen atau Variabel Terikat

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah kinerja keuangan, yang dapat diukur dengan menggunakan *CFROA*.

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan *Cash Flow Return On Asset (CFROA)*. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva.

$$CFROA = \frac{EBIT + Dep}{Asset}$$

Keterangan :

CFROA = *Cash Flow Return On Asset*

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak

Dep = Depresiasi

Asset = Total aktiva

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum data penelitian, mengenai variable-variabel penelitian yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Deskripsi variable tersebut disajikan untuk mengetahui nilai rata-rata (*mean*) minimum, maksimum dan standar deviasi dari variable-variabel yang diteliti. *Mean* digunakan untuk menghitung rata-rata variable yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk menghitung jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan disektor perbankan. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 1998 dalam Oktapiyani, 2009). Selain itu juga dilakukan uji asumsi klasik (*normality, multicollinearity, heterokedastisitas dan autokorelasi*).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, maka data yang diperoleh dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar, dan pengujian yang dilakukan antara lain :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan grafik *normal probability plot* serta pengujian *one sample kolmogorov smirnov*, yaitu untuk membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan

distribusi kumulatif dari distribusi normal. Atau dapat dikatakan bahwa uji ini bertujuan untuk menguji apakah variable tersebut memiliki distribusi normal atau tidak. Dalam Uji Normalitas ini ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual atau variable berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya kemiripan yang akan menyebabkan terjadinya korelasi, antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam satu model. Apabila sebagian atau seluruh variabel independen berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap variabel independen (Gozali, 2005).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas menggambarkan nilai hubungan antara nilai yang diprediksi dengan *Studentized Delete Residual* nilai tersebut. Uji heteroskedisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat digunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila grafik yang

ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi ini muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lain. Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar variabel pada periode tertentu dengan variabel periode sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson, dimana hasil pengujian ditentukan berdasarkan nilai Durbin-Watson. Uji Durbin Watson dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran factor gangguan yang berurutan.

3.5.3 Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Untuk mengukur analisis regresi berganda menggunakan alat bantu dengan program SPSS. Analisis regresi merupakan suatu alat statistik yang memberikan penjelasan mengenai pola hubungan antara dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Analisis regresi berganda digunakan apabila pengguna menggunakan atau memasukan lebih dari satu variabel prediktor. Salah satu prosedur pendugaan model untuk regresi linier berganda adalah dengan prosedur *Least Square* (kuadrat terkecil). Konsep dari metode

Least Square adalah menduga koefisien regresi (β) dengan meminimumkan kesalahan (*error*)

Persamaan Regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$\text{CFROA} = \beta_0 + \beta_1 \text{DIR} + \beta_2 \text{COM} + \beta_3 \text{PERS} + e$$

Keterangan :

CFROA = Cash Flow Return on Asset

β_0 = Konstanta

DIR = Ukuran Dewan Direksi

COM = Ukuran Dewan Komisaris

PERS = Ukuran Perusahaan

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisiensi Regresi

e = *error*

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Untuk melakukan pengujian hipotesis terhadap pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap kinerja keuangan (H_1 , H_2 , dan H_3) digunakan alat analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis yang

digunakan antara lain adalah uji koefisiensi regresi simultan (uji F), pengujian signifikan parameter individual (uji t) dan Koefisien Determinan (Uji R^2).

3.5.4.1 Uji Regresi Simultan (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan pengaruh variabel independen (Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris) terhadap variabel dependen (Kinerja Keuangan) secara bersama-sama dengan melihat nilai signifikan F. Jika nilai signifikan F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternative tidak dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen secara statistic mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama (Wardani, 2008).

Uji statistic F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol adalah joint hipotesis bahwa $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ secara simultan sama dengan nol (Gozali, 2005 dalam Irmala Sari, 2010).

3.5.4.2 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji secara signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Apabila tingkat signifikan yang diperoleh (*p-value*) lebih kecil dari 0,05 maka H_0 dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen tersebut berhubungan secara statistic terhadap variabel

dependen. Uji t ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian ini adalah jika probabilitas $< 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dan sebaliknya jika probabilitas $> 0,05$ maka dapat diambil kesimpulan bahwa corporate governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

3.5.4.3 Koefisien Determinan (Uji R^2)

Koefisiensi determinan (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa kemampuan model dapat dalam menerangkan variasi dependen. Nilai koefisiensi determinan antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang paling kecil berarti kemampuan variabel-variabel dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisiensi determinasi untuk data silang (*cross section*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisiensi determinan yang tinggi (Ghozali, 2009 dalam Irmala Sari, 2010).

Kelemahan dari penggunaan koefisiensi determinan ini adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel dependen, maka (R^2) pasti meningkat tidak peduli apakah

variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted (R^2) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai adjusted (R^2) dapat naik turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009 dalam Irmala Sari, 2010).